

KETIKA EKONOMI TUMBUH: APAKAH TARAF HIDUP MASYARAKAT IKUT MENINGKAT?

*Pertumbuhan, Kesejahteraan, Distribusi, dan Kualitas Kehidupan di
Indonesia*

Oleh:

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

www.rudycr.com/cv.pdf

Institut Bisnis dan Multimedia (IBM ASMI)

2026



KETIKA EKONOMI TUMBUH:

APAKAH TARAF HIDUP MASYARAKAT IKUT MENINGKAT?

Memahami hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkeadilan.



“Pertumbuhan ekonomi penting, tetapi bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah **kehidupan yang lebih baik** bagi setiap warga negara.”



EKONOMI TUMBUH
Produksi, investasi, dan pendapatan meningkat



PEKERJAAN & PENDAPATAN
Lebih banyak pekerjaan berkualitas dan upah layak



KUALITAS HIDUP
Pendidikan, kesehatan, perumahan, dan layanan publik lebih baik



KESEJAHTERAAN MENINGKAT
Hidup lebih layak, aman, dan bermartabat

FAKTOR PENENTU TARAF HIDUP MENINGKAT

-  Pekerjaan berkualitas & produktivitas tinggi
Kunci utama peningkatan pendapatan.
-  Pendidikan & keterampilan relevan
Membuka peluang kerja yang lebih baik.
-  Pemerataan & inklusi sosial
Pertumbuhan dinikmati oleh semua, bukan segelintir.
-  Akses layanan dasar yang berkualitas
Kesehatan, air bersih, energi, dan perumahan layak.
-  Tata kelola yang baik & antikorupsi
Kebijakan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.



“Pertumbuhan tanpa pemerataan hanyalah angka.
Pemerataan tanpa pertumbuhan hanyalah harapan.”

TANTANGAN UTAMA

-  Ketimpangan pendapatan
Kesenjangan yang lebar menghambat mobilitas sosial.
-  Pengangguran & pekerjaan informal
Produktivitas rendah dan pendapatan tidak menentu.
-  Transformasi teknologi & disrupsi
Mengubah jenis pekerjaan dan keterampilan yang dibutuhkan.
-  Perubahan iklim & kerentanan
Mengancam mata pencaharian dan keberlanjutan.
-  Kualitas kebijakan & implementasi
Program bagus tidak akan berdampak tanpa eksekusi yang kuat.



INTI PEMAHAMAN
Ekonomi tumbuh → pekerjaan berkualitas → pendapatan layak → layanan publik baik → taraf hidup meningkat.
Setiap mata rantai harus diperkuat secara bersamaan.



PESAN UTAMA
Pertumbuhan ekonomi adalah mesin, tetapi kesejahteraan masyarakat adalah tujuan. Kebijakan yang inklusif, berpihak pada rakyat, dan berkelanjutan adalah jawabannya.



Oleh:
Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD
 www.rudycct.com/cv.pdf
 **IBM-ASMI (Institut Bisnis dan Multimedia)**
Business · Multimedia · Digital · Entrepreneurship



Ekonomi yang tumbuh,
masyarakat yang sejahtera,
Indonesia yang berkeadilan.

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi sering diperlakukan sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan, tetapi peningkatan Produk Domestik Bruto tidak dengan sendirinya menjamin peningkatan taraf hidup seluruh masyarakat. Artikel ini membahas secara naratif dan komprehensif hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dengan konteks Indonesia, terutama melalui dimensi pekerjaan, upah riil, daya beli, kemiskinan, ketimpangan, pembangunan manusia, pendidikan, kesehatan, perumahan, lingkungan, digitalisasi, dan mobilitas sosial. Data mutakhir menunjukkan bahwa Indonesia tetap mencatat pertumbuhan yang kuat: ekonomi triwulan I-2026 tumbuh 5,61 persen secara tahunan; tingkat pengangguran terbuka Februari 2026 sebesar 4,68 persen; kemiskinan September 2025 turun menjadi 8,25 persen; Gini Ratio September 2025 sebesar 0,363; dan Indeks Pembangunan Manusia 2025 mencapai 75,90. Indikator-indikator tersebut menunjukkan kemajuan, tetapi juga menegaskan perlunya membaca kualitas dan distribusi pertumbuhan. Artikel ini berargumen bahwa taraf hidup meningkat secara berkelanjutan ketika pertumbuhan menghasilkan pekerjaan produktif, peningkatan upah riil, layanan publik yang lebih baik, perlindungan sosial yang adaptif, kesempatan mobilitas, lingkungan yang sehat, dan institusi pasar yang adil. Dengan demikian, pertumbuhan harus diperlakukan sebagai sarana untuk memperluas kapabilitas manusia, bukan sebagai tujuan akhir pembangunan.

Kata Kunci

pertumbuhan ekonomi; taraf hidup; kesejahteraan; daya beli; upah riil; pekerjaan; kemiskinan; ketimpangan; pembangunan manusia; produktivitas; mobilitas sosial; Indonesia

Ringkasan Indikator Kontekstual

Indikator	Nilai terkini	Makna analitis
Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2026	5,61% y-on-y	Menunjukkan ekspansi ekonomi yang kuat, tetapi perlu diuji distribusi manfaatnya.
TPT Februari 2026	4,68%	Pengangguran terbuka menurun, namun kualitas pekerjaan tetap penting.
Rata-rata upah buruh Februari 2026	Rp3,29 juta/bulan	Harus dibandingkan dengan biaya hidup dan produktivitas.
Kemiskinan September 2025	8,25%	Menunjukkan penurunan, tetapi kerentanan di atas garis kemiskinan tetap besar.
Gini Ratio September 2025	0,363	Ketimpangan pengeluaran membaik dibanding periode sebelumnya.
IPM 2025	75,90	Menunjukkan peningkatan kesehatan, pendidikan, dan standar hidup.

Inflasi Juni 2026	3,34% y-on-y	Menentukan apakah kenaikan pendapatan berubah menjadi daya beli riil.
IKK Mei 2026	120,9	Keyakinan konsumen tetap optimis.

Pendahuluan: Pertumbuhan dan Pertanyaan tentang Kehidupan Nyata

Ketika pemerintah, lembaga internasional, media, dan pelaku pasar menyatakan bahwa ekonomi tumbuh, pernyataan tersebut pada dasarnya merujuk pada peningkatan nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu periode. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto penting karena menunjukkan bahwa kapasitas ekonomi membesar. Namun bagi rumah tangga, pertanyaan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari bukanlah berapa persen PDB meningkat, melainkan apakah pendapatan keluarga bertambah, apakah pekerjaan lebih aman, apakah harga kebutuhan pokok tetap terjangkau, apakah anak dapat memperoleh pendidikan yang lebih baik, apakah layanan kesehatan semakin mudah diakses, dan apakah masa depan terasa lebih pasti. Dari sinilah muncul pertanyaan inti artikel ini: ketika ekonomi tumbuh, apakah taraf hidup masyarakat ikut meningkat?

Pertanyaan tersebut terdengar sederhana, tetapi secara akademik mengandung persoalan yang kompleks. Pertumbuhan adalah indikator agregat, sedangkan taraf hidup adalah pengalaman multidimensional. PDB dapat meningkat karena ekspor komoditas, investasi padat modal, pembangunan infrastruktur, atau peningkatan keuntungan perusahaan. Sebagian dari pertumbuhan itu mungkin mengalir kepada masyarakat melalui upah, lapangan kerja, penerimaan pajak, dan belanja pemerintah. Akan tetapi, sebagian lain dapat terkonsentrasi pada pemilik modal, wilayah tertentu, atau sektor tertentu. Dengan demikian, hubungan antara pertumbuhan dan kesejahteraan tidak bersifat otomatis; hubungan tersebut dimediasi oleh struktur ekonomi, pasar tenaga kerja, distribusi pendapatan, kualitas institusi, kebijakan fiskal, layanan publik, dan kemampuan masyarakat mengakses peluang ekonomi.

Indonesia memberikan konteks yang sangat relevan untuk membahas persoalan ini. Pada triwulan I-2026 ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan, lebih tinggi daripada periode yang sama tahun sebelumnya. Konsumsi rumah tangga menjadi salah satu sumber pertumbuhan terbesar, sedangkan industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan tetap menjadi sektor utama pembentuk PDB (BPS, 2026a). Pertumbuhan yang relatif kuat ini menunjukkan daya tahan ekonomi nasional. Namun penilaian yang lebih lengkap harus menanyakan bagaimana pertumbuhan itu berhubungan dengan upah riil, produktivitas, kemiskinan, ketimpangan, kualitas pekerjaan, dan pembangunan manusia.

Artikel ini menggunakan kerangka berpikir bahwa peningkatan taraf hidup harus dipahami sebagai perluasan kemampuan manusia untuk menjalani kehidupan yang dianggap bernilai. Pendapatan penting, tetapi bukan satu-satunya unsur. Kesehatan, pengetahuan, keamanan ekonomi, kualitas lingkungan, waktu, perumahan, transportasi, kesempatan berpartisipasi, dan rasa percaya terhadap masa depan juga merupakan bagian dari taraf hidup. Dengan kerangka ini, pertumbuhan tetap dipandang penting karena menyediakan sumber daya, tetapi kualitas pertumbuhan harus diuji melalui distribusi manfaat dan perubahan kemampuan hidup masyarakat.

1. Pertumbuhan Ekonomi: Apa yang Sebenarnya Diukur?

Produk Domestik Bruto mengukur nilai tambah seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi di suatu wilayah dalam periode tertentu. Ketika PDB riil meningkat, volume produksi ekonomi bertambah setelah pengaruh perubahan harga dikeluarkan. Indikator ini sangat berguna untuk menilai siklus ekonomi, kapasitas produksi, basis pajak, dan posisi ekonomi suatu negara. Akan tetapi, PDB tidak dirancang sebagai ukuran langsung kebahagiaan, keadilan, kualitas hubungan sosial, atau kesejahteraan subjektif. Kesalahan analitis muncul ketika pertumbuhan PDB diperlakukan seolah-olah identik dengan peningkatan taraf hidup.

Sebagai contoh, produksi dapat meningkat karena kegiatan pertambangan berskala besar yang menggunakan teknologi padat modal. Nilai tambah yang tercipta dapat besar, tetapi penyerapan tenaga kerja langsung relatif kecil. Jika laba mengalir terutama kepada pemilik modal dan pemasok tertentu, dampak pendapatan terhadap masyarakat luas mungkin terbatas. Sebaliknya, pertumbuhan sektor jasa, industri padat karya, dan UMKM dengan produktivitas meningkat dapat menciptakan efek penyebaran pendapatan yang lebih kuat. Oleh sebab itu, komposisi pertumbuhan sama pentingnya dengan besarnya pertumbuhan.

PDB per kapita sering digunakan sebagai pendekatan kasar terhadap rata-rata kemampuan ekonomi penduduk. Indikator ini membagi output nasional dengan jumlah penduduk. Namun rata-rata tidak menunjukkan distribusi. Dua negara atau dua daerah dengan PDB per kapita sama dapat mempunyai tingkat ketimpangan yang sangat berbeda. Karena itu, untuk menilai apakah pertumbuhan meningkatkan taraf hidup, PDB per kapita harus dibaca bersama median pendapatan, distribusi pengeluaran, upah riil, kemiskinan, dan indikator pembangunan manusia.

Sebagian aktivitas yang meningkatkan PDB dapat pula berhubungan dengan biaya sosial atau lingkungan. Pengeluaran untuk memperbaiki kerusakan akibat polusi dapat menambah aktivitas ekonomi, tetapi tidak berarti kesejahteraan bersih meningkat. Sebaliknya, kerja rumah tangga yang tidak dibayar, perawatan anggota keluarga, atau kualitas udara bersih memiliki nilai besar bagi kehidupan, tetapi tidak seluruhnya tercermin dalam PDB. Keterbatasan ini tidak membuat PDB tidak berguna; justru menegaskan bahwa PDB harus ditempatkan sebagai satu indikator dalam dashboard kesejahteraan yang lebih luas.

Implikasi analitis dan manajerial

Implikasi utama bagian ini adalah bahwa evaluasi kebijakan harus bergerak dari indikator output administratif menuju outcome rumah tangga. Setiap program pembangunan perlu menanyakan siapa yang menerima manfaat, apakah manfaat tersebut bertahan, dan apakah terjadi perubahan pada produktivitas, pendapatan riil, akses layanan, serta kemampuan menghadapi risiko. Pendekatan ini menuntut integrasi data ekonomi, sosial, spasial, dan lingkungan. Kebijakan yang tampak berhasil pada rata-rata nasional dapat memerlukan koreksi apabila dampaknya lemah bagi kelompok bawah, perempuan, pemuda, pekerja informal, atau wilayah dengan biaya hidup tinggi. Dengan demikian, manajemen pembangunan perlu menggunakan evaluasi distribusional sebagai bagian rutin dari pengambilan keputusan.

2. Taraf Hidup: Dari Pendapatan menuju Kapabilitas

Taraf hidup dapat didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan memperoleh barang dan jasa, tetapi pendekatan modern melihatnya secara lebih luas. Amartya Sen mengembangkan pendekatan kapabilitas yang menekankan apa yang sungguh-sungguh dapat dilakukan dan dijalani seseorang. Dua

orang dengan pendapatan sama belum tentu memiliki taraf hidup sama apabila salah satunya hidup dengan penyakit kronis, menghadapi biaya transportasi tinggi, atau tinggal di daerah dengan akses pendidikan rendah. Karena itu, kualitas hidup bergantung pada kemampuan mengubah sumber daya menjadi fungsi kehidupan yang nyata.

Dalam konteks kebijakan, pendekatan ini mengubah fokus dari sekadar besarnya pendapatan menuju kualitas akses. Peningkatan gaji memang memperbesar pilihan rumah tangga, tetapi sekolah publik yang berkualitas dapat meningkatkan kesejahteraan tanpa harus menambah pendapatan tunai. Transportasi publik yang efisien mengurangi biaya dan waktu perjalanan. Pelayanan kesehatan primer yang baik mengurangi risiko pengeluaran katastrofik. Air bersih, sanitasi, dan keamanan lingkungan memperbaiki kualitas hidup secara langsung. Dengan demikian, layanan publik dapat dipandang sebagai bagian dari pendapatan sosial yang memperbesar kemampuan efektif rumah tangga.

Indeks Pembangunan Manusia mencoba menangkap sebagian dimensi tersebut melalui umur panjang dan sehat, pendidikan, serta standar hidup layak. BPS melaporkan IPM Indonesia pada 2025 mencapai 75,90. Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan meningkat, sementara dimensi pendidikan dan umur panjang juga membaik (BPS, 2026b). Ini merupakan bukti bahwa sebagian kemajuan ekonomi telah diterjemahkan menjadi pembangunan manusia. Namun nilai nasional tetap menyembunyikan variasi antardaerah dan antarkelompok sosial.

Karena itu, pertanyaan yang tepat bukan 'apakah ekonomi tumbuh atau taraf hidup meningkat', melainkan 'melalui mekanisme apa pertumbuhan diterjemahkan menjadi taraf hidup, untuk siapa, di mana, dan seberapa berkelanjutan'. Kerangka ini mendorong analisis distribusional dan spasial. Pertumbuhan yang meningkatkan pendapatan kelompok bawah, memperluas akses layanan dasar, dan mengurangi ketidakpastian akan mempunyai dampak kesejahteraan lebih besar daripada pertumbuhan dengan manfaat terkonsentrasi.

Implikasi analitis dan manajerial

Implikasi utama bagian ini adalah bahwa evaluasi kebijakan harus bergerak dari indikator output administratif menuju outcome rumah tangga. Setiap program pembangunan perlu menanyakan siapa yang menerima manfaat, apakah manfaat tersebut bertahan, dan apakah terjadi perubahan pada produktivitas, pendapatan riil, akses layanan, serta kemampuan menghadapi risiko. Pendekatan ini menuntut integrasi data ekonomi, sosial, spasial, dan lingkungan. Kebijakan yang tampak berhasil pada rata-rata nasional dapat memerlukan koreksi apabila dampaknya lemah bagi kelompok bawah, perempuan, pemuda, pekerja informal, atau wilayah dengan biaya hidup tinggi. Dengan demikian, manajemen pembangunan perlu menggunakan evaluasi distribusional sebagai bagian rutin dari pengambilan keputusan.

3. Pekerjaan sebagai Jembatan antara Pertumbuhan dan Kesejahteraan

Bagi sebagian besar rumah tangga, pekerjaan merupakan mekanisme utama yang menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan taraf hidup. Ketika perusahaan meningkatkan produksi dan permintaan, mereka dapat menambah tenaga kerja, memperpanjang jam kerja, atau menaikkan upah. Pendapatan pekerja kemudian menjadi konsumsi rumah tangga, tabungan, investasi pendidikan, dan pembayaran perumahan. Karena itu, kualitas pasar kerja menentukan apakah pertumbuhan dirasakan luas oleh masyarakat.

Pada Februari 2026, jumlah penduduk bekerja di Indonesia mencapai 147,67 juta orang dan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,68 persen (BPS, 2026c). Angka ini menunjukkan perbaikan dibanding tahun sebelumnya. Namun indikator pengangguran tidak cukup untuk menilai kualitas pekerjaan. Seorang pekerja dapat diklasifikasikan sebagai bekerja meskipun jam kerjanya sangat sedikit, penghasilannya tidak stabil, atau produktivitas pekerjaannya rendah. Analisis harus memasukkan underemployment, formalitas, upah, perlindungan sosial, keselamatan kerja, dan kesempatan meningkatkan keterampilan.

Kualitas pekerjaan sangat penting karena pertumbuhan yang padat modal dapat menghasilkan output tinggi dengan penyerapan tenaga kerja terbatas. Sebaliknya, pekerjaan yang terlalu padat karya tetapi berproduktivitas rendah dapat mempertahankan banyak orang pada tingkat pendapatan subsisten. Strategi ideal adalah penciptaan pekerjaan produktif: kesempatan kerja bertambah sekaligus produktivitas meningkat. Inilah dasar yang memungkinkan perusahaan membayar upah lebih tinggi tanpa kehilangan daya saing.

Hubungan antara pekerjaan dan taraf hidup juga memiliki dimensi psikologis dan sosial. Pekerjaan dapat memberikan identitas, jaringan sosial, pembelajaran, serta rasa memiliki peran dalam masyarakat. Pengangguran berkepanjangan, terutama pada kaum muda, dapat menimbulkan scarring yang memengaruhi pendapatan masa depan dan kepercayaan diri. Maka pertumbuhan berkualitas perlu menyediakan jalur masuk bagi lulusan baru, perempuan, pekerja informal, dan kelompok rentan menuju pekerjaan yang lebih produktif dan aman.

Implikasi analitis dan manajerial

Implikasi utama bagian ini adalah bahwa evaluasi kebijakan harus bergerak dari indikator output administratif menuju outcome rumah tangga. Setiap program pembangunan perlu menanyakan siapa yang menerima manfaat, apakah manfaat tersebut bertahan, dan apakah terjadi perubahan pada produktivitas, pendapatan riil, akses layanan, serta kemampuan menghadapi risiko. Pendekatan ini menuntut integrasi data ekonomi, sosial, spasial, dan lingkungan. Kebijakan yang tampak berhasil pada rata-rata nasional dapat memerlukan koreksi apabila dampaknya lemah bagi kelompok bawah, perempuan, pemuda, pekerja informal, atau wilayah dengan biaya hidup tinggi. Dengan demikian, manajemen pembangunan perlu menggunakan evaluasi distribusional sebagai bagian rutin dari pengambilan keputusan.

4. Upah Riil dan Daya Beli: Apakah Pendapatan Mengalahkan Harga?

Kenaikan pendapatan nominal belum tentu berarti kenaikan taraf hidup. Yang menentukan adalah pendapatan riil, yaitu kemampuan pendapatan tersebut membeli barang dan jasa setelah memperhitungkan perubahan harga. Jika upah naik 5 persen sementara biaya hidup naik 7 persen, pekerja secara nominal menerima lebih banyak uang tetapi secara riil menjadi lebih miskin. Karena itu, inflasi dan struktur harga kebutuhan dasar merupakan pusat hubungan antara pertumbuhan dan kesejahteraan.

BPS mencatat rata-rata upah buruh pada Februari 2026 sekitar Rp3,29 juta per bulan (BPS, 2026c). Angka rata-rata ini penting tetapi perlu dibaca hati-hati karena perbedaan upah antarwilayah, sektor, pendidikan, gender, dan jenis pekerjaan sangat besar. Selain itu, rumah tangga menghadapi keranjang konsumsi berbeda. Kelompok berpendapatan rendah mengalokasikan proporsi lebih besar untuk pangan dan transportasi, sehingga kenaikan harga kebutuhan pokok dapat terasa lebih berat dibanding inflasi rata-rata.

Inflasi nasional pada Juni 2026 tercatat 3,34 persen secara tahunan (BPS, 2026d). Angka agregat tersebut relatif moderat, tetapi variasi antarwilayah cukup besar. Hal ini memperlihatkan bahwa taraf hidup tidak dapat dianalisis hanya melalui indeks nasional. Biaya hidup di wilayah terpencil, kepulauan, atau daerah dengan logistik mahal dapat membatasi manfaat kenaikan pendapatan.

Daya beli juga dipengaruhi biaya yang tidak selalu terlihat sebagai konsumsi pilihan, misalnya cicilan rumah, biaya sekolah, obat, transportasi harian, dan utang. Keluarga dengan pendapatan meningkat dapat tetap merasa tertekan apabila proporsi pengeluaran wajib bertambah. Karena itu, kebijakan peningkatan taraf hidup harus menggabungkan pertumbuhan upah riil dengan pengendalian inflasi, layanan publik yang baik, perumahan terjangkau, dan pengelolaan risiko utang rumah tangga.

Implikasi analitis dan manajerial

Implikasi utama bagian ini adalah bahwa evaluasi kebijakan harus bergerak dari indikator output administratif menuju outcome rumah tangga. Setiap program pembangunan perlu menanyakan siapa yang menerima manfaat, apakah manfaat tersebut bertahan, dan apakah terjadi perubahan pada produktivitas, pendapatan riil, akses layanan, serta kemampuan menghadapi risiko. Pendekatan ini menuntut integrasi data ekonomi, sosial, spasial, dan lingkungan. Kebijakan yang tampak berhasil pada rata-rata nasional dapat memerlukan koreksi apabila dampaknya lemah bagi kelompok bawah, perempuan, pemuda, pekerja informal, atau wilayah dengan biaya hidup tinggi. Dengan demikian, manajemen pembangunan perlu menggunakan evaluasi distribusional sebagai bagian rutin dari pengambilan keputusan.

5. Kemiskinan: Apakah Pertumbuhan Mengangkat Kelompok Terbawah?

Salah satu ukuran paling langsung untuk melihat dampak pertumbuhan adalah perubahan kemiskinan. BPS melaporkan tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2025 sebesar 8,25 persen, turun dibanding Maret 2025 dan September 2024 (BPS, 2026e). Penurunan ini menunjukkan kemajuan penting. Namun garis kemiskinan mendefinisikan ambang minimum, bukan taraf hidup yang aman. Rumah tangga yang sedikit berada di atas garis kemiskinan masih dapat sangat rentan terhadap kehilangan pekerjaan, sakit, bencana, atau lonjakan harga.

Karena itu, keberhasilan pertumbuhan tidak seharusnya hanya diukur dari berapa banyak orang keluar dari kemiskinan, tetapi juga apakah mereka memperoleh jarak aman dari kemiskinan. Konsep *vulnerability to poverty* penting karena rumah tangga yang rentan mungkin kembali miskin ketika terkena shock. Stabilitas pendapatan, tabungan darurat, asuransi kesehatan, perlindungan sosial, dan akses kredit yang sehat menentukan kemampuan bertahan.

Pertumbuhan yang *pro-poor* berarti pendapatan kelompok miskin tumbuh cukup cepat dan mereka memperoleh akses terhadap peluang produktif. Bantuan sosial dapat mencegah penurunan konsumsi saat krisis, tetapi mobilitas jangka panjang membutuhkan pendidikan, kesehatan, keterampilan, infrastruktur, dan pasar kerja. Dengan kata lain, *safety net* harus dihubungkan dengan *opportunity ladder*. Masyarakat tidak cukup hanya dilindungi dari jatuh; mereka juga memerlukan tangga untuk naik.

Kemiskinan juga memiliki dimensi wilayah. Tingkat kemiskinan perdesaan masih lebih tinggi dibanding perkotaan. Hal ini berkaitan dengan produktivitas pertanian, akses layanan, struktur pekerjaan, kualitas infrastruktur, dan jarak ke pasar. Strategi peningkatan taraf hidup harus menyesuaikan intervensi dengan karakter wilayah, bukan menggunakan satu formula seragam untuk seluruh Indonesia.

Implikasi analitis dan manajerial

Implikasi utama bagian ini adalah bahwa evaluasi kebijakan harus bergerak dari indikator output administratif menuju outcome rumah tangga. Setiap program pembangunan perlu menanyakan siapa yang menerima manfaat, apakah manfaat tersebut bertahan, dan apakah terjadi perubahan pada produktivitas, pendapatan riil, akses layanan, serta kemampuan menghadapi risiko. Pendekatan ini menuntut integrasi data ekonomi, sosial, spasial, dan lingkungan. Kebijakan yang tampak berhasil pada rata-rata nasional dapat memerlukan koreksi apabila dampaknya lemah bagi kelompok bawah, perempuan, pemuda, pekerja informal, atau wilayah dengan biaya hidup tinggi. Dengan demikian, manajemen pembangunan perlu menggunakan evaluasi distribusional sebagai bagian rutin dari pengambilan keputusan.

6. Ketimpangan: Pertumbuhan untuk Siapa?

Pertumbuhan rata-rata dapat terjadi bersamaan dengan ketimpangan yang tinggi. Gini Ratio Indonesia pada September 2025 sebesar 0,363, turun dibanding periode sebelumnya (BPS, 2026f). Penurunan tersebut positif karena menunjukkan distribusi pengeluaran yang lebih merata. Namun analisis ketimpangan perlu bergerak lebih jauh daripada satu indeks. Kita perlu memahami siapa yang memperoleh kenaikan pendapatan, bagaimana kepemilikan aset berkembang, dan apakah mobilitas antargenerasi membaik.

Ketimpangan penting bukan hanya karena pertimbangan keadilan, tetapi juga karena memengaruhi efektivitas pertumbuhan terhadap kesejahteraan. Tambahan pendapatan bagi rumah tangga miskin biasanya menghasilkan peningkatan besar pada kecukupan gizi, kesehatan, pendidikan, dan kualitas perumahan. Tambahan pendapatan pada kelompok kaya memiliki manfaat marginal yang lebih kecil terhadap kebutuhan dasar. Karena itu, distribusi manfaat pertumbuhan menentukan berapa besar kenaikan kesejahteraan sosial yang dihasilkan oleh satu persen pertumbuhan.

Ketimpangan kesempatan bahkan lebih mendasar daripada ketimpangan hasil. Anak yang lahir di keluarga miskin mungkin menghadapi sekolah berkualitas rendah, gizi buruk, akses digital terbatas, dan jaringan sosial sempit. Apabila kondisi awal ini menentukan masa depannya, pertumbuhan ekonomi tidak cukup membuka mobilitas sosial. Kebijakan harus memutus transmisi ketimpangan antargenerasi melalui investasi pada anak usia dini, sekolah, kesehatan, sanitasi, dan akses perguruan tinggi atau pelatihan berkualitas.

Ketimpangan aset juga perlu diperhatikan. Rumah tangga yang memiliki tanah, rumah, saham, atau usaha dapat memperoleh keuntungan dari kenaikan harga aset, sedangkan penyewa atau pekerja tanpa aset tidak menerima manfaat sama. Bahkan pertumbuhan kota dapat meningkatkan harga tanah dan sewa sehingga sebagian masyarakat terdorong semakin jauh dari pusat pekerjaan. Karena itu, kebijakan perumahan dan tata ruang merupakan bagian dari kebijakan distribusi kesejahteraan.

Implikasi analitis dan manajerial

Implikasi utama bagian ini adalah bahwa evaluasi kebijakan harus bergerak dari indikator output administratif menuju outcome rumah tangga. Setiap program pembangunan perlu menanyakan siapa yang menerima manfaat, apakah manfaat tersebut bertahan, dan apakah terjadi perubahan pada produktivitas, pendapatan riil, akses layanan, serta kemampuan menghadapi risiko. Pendekatan ini menuntut integrasi data ekonomi, sosial, spasial, dan lingkungan. Kebijakan yang tampak berhasil pada rata-rata nasional dapat memerlukan koreksi apabila dampaknya lemah bagi kelompok bawah, perempuan, pemuda, pekerja

informal, atau wilayah dengan biaya hidup tinggi. Dengan demikian, manajemen pembangunan perlu menggunakan evaluasi distribusional sebagai bagian rutin dari pengambilan keputusan.

7. Produktivitas sebagai Sumber Kenaikan Taraf Hidup yang Berkelanjutan

Dalam jangka panjang, kenaikan taraf hidup yang berkelanjutan bergantung pada produktivitas: kemampuan menghasilkan lebih banyak nilai dari tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan. Tanpa produktivitas, kenaikan upah yang terlalu cepat dapat meningkatkan biaya dan mengurangi daya saing. Sebaliknya, produktivitas yang naik tetapi manfaatnya tidak dibagikan kepada pekerja dapat menghasilkan ketegangan distribusi. Tantangannya adalah menciptakan hubungan sehat antara produktivitas, laba, upah, dan investasi.

World Bank pada 2026 menekankan bahwa reformasi produktivitas dan penciptaan pekerjaan berkualitas penting agar pertumbuhan Indonesia berlanjut dan diterjemahkan menjadi taraf hidup yang lebih tinggi (World Bank, 2026a). Hambatan seperti kekuatan pasar, regulasi, logistik, dan difusi keterampilan membatasi pergerakan pekerja ke aktivitas bernilai tambah lebih tinggi. Artinya, produktivitas bukan sekadar persoalan teknologi, tetapi juga organisasi pasar dan kualitas institusi.

Pada tingkat perusahaan, produktivitas dapat ditingkatkan melalui teknologi, manajemen, kualitas proses, akses pasar, pembiayaan, energi yang andal, logistik, serta keterampilan pekerja. Banyak UMKM dapat meningkatkan produktivitas bukan hanya dengan mesin mahal, melainkan dengan pencatatan yang lebih baik, pengendalian persediaan, pemasaran digital, desain produk, dan standar mutu. Penyebaran kemampuan manajerial menjadi faktor penting.

Kenaikan produktivitas juga harus disertai mekanisme distribusi manfaat. Persaingan tenaga kerja yang sehat, penguatan kompetensi, sistem pengupahan, dan dialog sosial dapat membantu pekerja memperoleh bagian dari peningkatan nilai tambah. Jika produktivitas meningkat tetapi upah riil stagnan, masyarakat mungkin tidak merasakan pertumbuhan sebagai peningkatan taraf hidup.

Implikasi analitis dan manajerial

Implikasi utama bagian ini adalah bahwa evaluasi kebijakan harus bergerak dari indikator output administratif menuju outcome rumah tangga. Setiap program pembangunan perlu menanyakan siapa yang menerima manfaat, apakah manfaat tersebut bertahan, dan apakah terjadi perubahan pada produktivitas, pendapatan riil, akses layanan, serta kemampuan menghadapi risiko. Pendekatan ini menuntut integrasi data ekonomi, sosial, spasial, dan lingkungan. Kebijakan yang tampak berhasil pada rata-rata nasional dapat memerlukan koreksi apabila dampaknya lemah bagi kelompok bawah, perempuan, pemuda, pekerja informal, atau wilayah dengan biaya hidup tinggi. Dengan demikian, manajemen pembangunan perlu menggunakan evaluasi distribusional sebagai bagian rutin dari pengambilan keputusan.

8. Pendidikan, Keterampilan, dan Mobilitas Ekonomi

Pendidikan berfungsi ganda dalam hubungan antara pertumbuhan dan taraf hidup. Pertama, pendidikan merupakan komponen kesejahteraan karena memperluas pengetahuan, otonomi, dan partisipasi sosial. Kedua, pendidikan meningkatkan peluang memasuki pekerjaan produktif. Namun hubungan antara pendidikan dan pendapatan tidak otomatis apabila kurikulum tidak sesuai kebutuhan,

kualitas belajar rendah, atau ekonomi tidak menciptakan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tinggi.

Indonesia telah mengalami peningkatan indikator pendidikan dalam IPM, tetapi tantangan kualitas dan relevansi tetap besar. Perusahaan membutuhkan kemampuan teknis sekaligus kemampuan berkomunikasi, memecahkan masalah, bekerja dalam tim, dan beradaptasi terhadap teknologi. Karena itu, sistem pendidikan harus menggabungkan fondasi akademik dengan pembelajaran sepanjang hayat dan pengalaman kerja nyata.

Transformasi digital dan AI mempercepat perubahan keterampilan. Pekerjaan tidak selalu hilang secara utuh; sering kali tugas-tugas tertentu yang berubah. Pekerja yang mampu menggunakan teknologi untuk memperkuat produktivitas akan memiliki posisi lebih baik dibanding mereka yang keterampilannya mudah digantikan. Reskilling dan upskilling menjadi mekanisme utama agar pertumbuhan teknologi meningkatkan, bukan menurunkan, taraf hidup.

Mobilitas sosial membutuhkan akses pendidikan yang tidak terlalu ditentukan oleh pendapatan keluarga. Beasiswa, pembiayaan pendidikan, sekolah berkualitas, akses internet, dan layanan gizi anak merupakan investasi pada kesetaraan kesempatan. Dalam jangka panjang, investasi tersebut juga memperkuat basis produktivitas nasional dan kemampuan masyarakat menyerap perubahan teknologi.

Implikasi analitis dan manajerial

Implikasi utama bagian ini adalah bahwa evaluasi kebijakan harus bergerak dari indikator output administratif menuju outcome rumah tangga. Setiap program pembangunan perlu menanyakan siapa yang menerima manfaat, apakah manfaat tersebut bertahan, dan apakah terjadi perubahan pada produktivitas, pendapatan riil, akses layanan, serta kemampuan menghadapi risiko. Pendekatan ini menuntut integrasi data ekonomi, sosial, spasial, dan lingkungan. Kebijakan yang tampak berhasil pada rata-rata nasional dapat memerlukan koreksi apabila dampaknya lemah bagi kelompok bawah, perempuan, pemuda, pekerja informal, atau wilayah dengan biaya hidup tinggi. Dengan demikian, manajemen pembangunan perlu menggunakan evaluasi distribusional sebagai bagian rutin dari pengambilan keputusan.

9. Kesehatan sebagai Komponen dan Prasyarat Kesejahteraan

Taraf hidup tidak dapat dipisahkan dari kesehatan. Pendapatan tinggi kehilangan banyak makna jika seseorang tidak dapat memperoleh perawatan atau hidup dalam kondisi yang merusak kesehatan. Kesehatan juga merupakan modal produktif: pekerja yang sehat memiliki kemampuan belajar, bekerja, dan berinovasi lebih baik. Karena itu, belanja kesehatan bukan hanya konsumsi sosial, tetapi investasi ekonomi.

Kenaikan pendapatan dapat memperbaiki gizi, perumahan, sanitasi, dan akses perawatan, tetapi pertumbuhan ekonomi juga dapat membawa risiko baru seperti polusi, stres kerja, kecelakaan lalu lintas, dan penyakit tidak menular. Dengan demikian, pertumbuhan harus disertai regulasi lingkungan, keselamatan kerja, transportasi aman, dan sistem kesehatan yang kuat.

Jaminan kesehatan memiliki efek langsung pada taraf hidup karena mengurangi risiko pengeluaran katastrofik. Keluarga yang tidak terlindungi dapat jatuh miskin akibat satu episode penyakit serius. Perlindungan risiko semacam ini sering tidak terlihat dalam angka pendapatan bulanan, tetapi sangat menentukan rasa aman ekonomi.

Perbaikan IPM Indonesia yang mencakup peningkatan umur harapan hidup menunjukkan bahwa pembangunan manusia bergerak maju. Namun tantangan berikutnya adalah kualitas layanan dan kesenjangan akses antarwilayah. Dokter, rumah sakit, fasilitas primer, obat, dan transportasi kesehatan harus tersedia secara lebih merata agar manfaat pertumbuhan tidak terkonsentrasi di wilayah perkotaan maju.

Implikasi analitis dan manajerial

Implikasi utama bagian ini adalah bahwa evaluasi kebijakan harus bergerak dari indikator output administratif menuju outcome rumah tangga. Setiap program pembangunan perlu menanyakan siapa yang menerima manfaat, apakah manfaat tersebut bertahan, dan apakah terjadi perubahan pada produktivitas, pendapatan riil, akses layanan, serta kemampuan menghadapi risiko. Pendekatan ini menuntut integrasi data ekonomi, sosial, spasial, dan lingkungan. Kebijakan yang tampak berhasil pada rata-rata nasional dapat memerlukan koreksi apabila dampaknya lemah bagi kelompok bawah, perempuan, pemuda, pekerja informal, atau wilayah dengan biaya hidup tinggi. Dengan demikian, manajemen pembangunan perlu menggunakan evaluasi distribusional sebagai bagian rutin dari pengambilan keputusan.

10. Perumahan, Transportasi, dan Biaya Hidup Perkotaan

Pertumbuhan kota sering menghasilkan peluang kerja, tetapi juga menaikkan harga tanah, sewa, dan biaya perjalanan. Seorang pekerja dapat memperoleh upah lebih tinggi di kota, tetapi kesejahteraan bersihnya tidak banyak meningkat bila sebagian besar tambahan pendapatan habis untuk sewa dan transportasi. Karena itu, analisis taraf hidup harus memperhitungkan biaya akses terhadap lokasi ekonomi.

Perumahan bukan hanya aset; ia menentukan kesehatan, keamanan, waktu tempuh, akses sekolah, dan jaringan sosial. Kebijakan perumahan yang hanya meningkatkan jumlah unit tanpa memperhatikan lokasi dapat menghasilkan rumah yang murah tetapi jauh dari pekerjaan. Integrasi perumahan dengan transportasi publik dan tata ruang merupakan syarat penting pertumbuhan inklusif.

Transportasi publik yang efisien berfungsi seperti peningkatan pendapatan riil. Ketika biaya dan waktu perjalanan turun, rumah tangga memperoleh lebih banyak sumber daya dan waktu untuk kegiatan lain. Perusahaan juga mendapat manfaat karena pasar tenaga kerja menjadi lebih luas. Dengan demikian, infrastruktur transportasi memiliki efek kesejahteraan yang melampaui kontribusinya terhadap PDB konstruksi.

Kota yang tumbuh perlu menjaga agar ruang publik, kualitas udara, drainase, air bersih, dan keamanan tidak tertinggal. Jika pertumbuhan ekonomi dibayar dengan kemacetan, polusi, banjir, dan stres, kenaikan PDB dapat melebihi-lebihkan peningkatan kualitas hidup bersih.

Implikasi analitis dan manajerial

Implikasi utama bagian ini adalah bahwa evaluasi kebijakan harus bergerak dari indikator output administratif menuju outcome rumah tangga. Setiap program pembangunan perlu menanyakan siapa yang menerima manfaat, apakah manfaat tersebut bertahan, dan apakah terjadi perubahan pada produktivitas, pendapatan riil, akses layanan, serta kemampuan menghadapi risiko. Pendekatan ini menuntut integrasi data ekonomi, sosial, spasial, dan lingkungan. Kebijakan yang tampak berhasil pada rata-rata nasional dapat memerlukan koreksi apabila dampaknya lemah bagi kelompok bawah, perempuan, pemuda, pekerja

informal, atau wilayah dengan biaya hidup tinggi. Dengan demikian, manajemen pembangunan perlu menggunakan evaluasi distribusional sebagai bagian rutin dari pengambilan keputusan.

11. UMKM dan Ekonomi Lokal

UMKM merupakan arena penting tempat pertumbuhan dan taraf hidup bertemu. Sebagian besar masyarakat berinteraksi dengan ekonomi bukan melalui perusahaan besar, melainkan melalui warung, bengkel, usaha makanan, jasa, perdagangan, pertanian, dan usaha keluarga. Ketika daya beli meningkat, pendapatan berputar melalui jaringan ekonomi lokal dan menciptakan multiplier yang kuat.

Namun banyak UMKM berada pada produktivitas rendah. Kebijakan yang hanya memberikan kredit dapat menambah utang tanpa memperbaiki kemampuan usaha. Pendekatan yang lebih efektif menggabungkan pembiayaan, pasar, teknologi, manajemen, sertifikasi, desain, logistik, dan kemitraan rantai pasok. Tujuannya adalah membantu usaha naik kelas dan mampu membayar upah lebih baik.

Digitalisasi membuka pasar baru tetapi juga menciptakan ketergantungan pada platform. Pelaku usaha dapat menjangkau konsumen lebih luas, tetapi menghadapi komisi, algoritma, persaingan harga, dan biaya iklan. Literasi digital perlu dilengkapi dengan kemampuan menghitung margin, mempertahankan pelanggan, dan mengelola data.

Jika pertumbuhan ekonomi nasional tidak memperkuat usaha lokal, manfaatnya dapat bocor keluar wilayah. Sebaliknya, supplier development, pengadaan lokal, dan kemitraan yang adil dapat membuat investasi besar menumbuhkan ekosistem usaha di sekitarnya. Inilah salah satu cara mengubah pertumbuhan proyek menjadi peningkatan taraf hidup regional.

Implikasi analitis dan manajerial

Implikasi utama bagian ini adalah bahwa evaluasi kebijakan harus bergerak dari indikator output administratif menuju outcome rumah tangga. Setiap program pembangunan perlu menanyakan siapa yang menerima manfaat, apakah manfaat tersebut bertahan, dan apakah terjadi perubahan pada produktivitas, pendapatan riil, akses layanan, serta kemampuan menghadapi risiko. Pendekatan ini menuntut integrasi data ekonomi, sosial, spasial, dan lingkungan. Kebijakan yang tampak berhasil pada rata-rata nasional dapat memerlukan koreksi apabila dampaknya lemah bagi kelompok bawah, perempuan, pemuda, pekerja informal, atau wilayah dengan biaya hidup tinggi. Dengan demikian, manajemen pembangunan perlu menggunakan evaluasi distribusional sebagai bagian rutin dari pengambilan keputusan.

12. Pertumbuhan Digital, AI, dan Risiko Kesenjangan Baru

Ekonomi digital dan kecerdasan buatan dapat meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya transaksi, memperluas akses informasi, dan menciptakan model bisnis baru. Namun teknologi juga dapat memperbesar kesenjangan apabila manfaatnya terkonsentrasi pada pekerja berpendidikan tinggi, perusahaan besar, dan wilayah dengan infrastruktur digital kuat.

AI terutama mengubah komposisi tugas. Sebagian pekerjaan administratif dan rutin dapat diotomatisasi, sementara permintaan meningkat untuk analisis, pengawasan sistem, kreativitas, pelayanan manusia, dan keahlian teknis. Taraf hidup akan meningkat apabila produktivitas yang dihasilkan AI diterjemahkan menjadi upah, pekerjaan baru, harga lebih rendah, atau layanan yang lebih baik. Sebaliknya, jika keuntungan produktivitas hanya menjadi konsentrasi laba, ketimpangan dapat meningkat.

Kebijakan perlu melindungi manusia, bukan membekukan teknologi. Reskilling, jaminan sosial portabel, layanan karier, dan akses terhadap pembelajaran digital membantu pekerja berpindah. UMKM perlu memperoleh akses perangkat, cloud, keamanan siber, dan pendampingan agar tidak tertinggal.

Etika data juga bagian dari kesejahteraan. Privasi, keamanan, transparansi algoritma, dan perlindungan konsumen menentukan apakah digitalisasi meningkatkan kebebasan atau justru menciptakan bentuk baru eksploitasi. Pertumbuhan digital yang baik harus memperluas kemampuan manusia dan kepercayaan, bukan hanya jumlah transaksi.

Implikasi analitis dan manajerial

Implikasi utama bagian ini adalah bahwa evaluasi kebijakan harus bergerak dari indikator output administratif menuju outcome rumah tangga. Setiap program pembangunan perlu menanyakan siapa yang menerima manfaat, apakah manfaat tersebut bertahan, dan apakah terjadi perubahan pada produktivitas, pendapatan riil, akses layanan, serta kemampuan menghadapi risiko. Pendekatan ini menuntut integrasi data ekonomi, sosial, spasial, dan lingkungan. Kebijakan yang tampak berhasil pada rata-rata nasional dapat memerlukan koreksi apabila dampaknya lemah bagi kelompok bawah, perempuan, pemuda, pekerja informal, atau wilayah dengan biaya hidup tinggi. Dengan demikian, manajemen pembangunan perlu menggunakan evaluasi distribusional sebagai bagian rutin dari pengambilan keputusan.

13. Lingkungan: Ketika Pertumbuhan Mengurangi Kualitas Hidup

Pertumbuhan ekonomi yang mengabaikan lingkungan dapat menciptakan paradoks: pendapatan naik tetapi kualitas hidup menurun karena udara kotor, air tercemar, panas ekstrem, banjir, atau hilangnya sumber penghidupan. Biaya lingkungan sering tidak tercermin langsung dalam harga pasar sehingga PDB dapat meningkat sementara kekayaan alam dan kesehatan publik menurun.

Indonesia sebagai negara megabiodiversitas memiliki kepentingan khusus menjaga modal alam. Hutan, mangrove, terumbu karang, tanah, dan sumber air menyediakan jasa ekosistem yang menopang pangan, perlindungan bencana, pariwisata, dan mata pencaharian. Degradasi modal alam dapat meningkatkan PDB jangka pendek tetapi mengurangi kapasitas ekonomi masa depan.

Konsep green growth mencoba menyelaraskan produktivitas dengan efisiensi energi, ekonomi sirkular, energi terbarukan, transportasi rendah karbon, dan pemulihan ekosistem. Transisi ini dapat menciptakan green jobs, tetapi perlu dirancang sebagai just transition agar pekerja dan daerah yang bergantung pada sektor lama tidak menanggung biaya secara tidak proporsional.

Kesejahteraan antargenerasi juga harus masuk perhitungan. Taraf hidup masyarakat hari ini tidak boleh ditingkatkan dengan mengorbankan kemampuan generasi mendatang memenuhi kebutuhannya. Karena itu, indikator kemajuan perlu melihat bukan hanya pendapatan sekarang, tetapi juga keberlanjutan aset manusia, fisik, sosial, dan alam.

Implikasi analitis dan manajerial

Implikasi utama bagian ini adalah bahwa evaluasi kebijakan harus bergerak dari indikator output administratif menuju outcome rumah tangga. Setiap program pembangunan perlu menanyakan siapa yang menerima manfaat, apakah manfaat tersebut bertahan, dan apakah terjadi perubahan pada produktivitas, pendapatan riil, akses layanan, serta kemampuan menghadapi risiko. Pendekatan ini menuntut integrasi data ekonomi, sosial, spasial, dan lingkungan. Kebijakan yang tampak berhasil pada rata-rata nasional

dapat memerlukan koreksi apabila dampaknya lemah bagi kelompok bawah, perempuan, pemuda, pekerja informal, atau wilayah dengan biaya hidup tinggi. Dengan demikian, manajemen pembangunan perlu menggunakan evaluasi distribusional sebagai bagian rutin dari pengambilan keputusan.

14. Perbedaan Wilayah: Satu Pertumbuhan, Banyak Pengalaman

Indonesia adalah negara kepulauan dengan struktur ekonomi yang sangat beragam. Pertumbuhan di Jawa, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, Sumatra, Maluku, dan Papua dapat didorong oleh sektor berbeda dan mempunyai implikasi kesejahteraan berbeda. Karena itu, pertumbuhan nasional lebih dari lima persen tidak berarti setiap daerah mengalami peningkatan dengan kecepatan dan kualitas yang sama.

BPS menunjukkan bahwa pada triwulan I-2026 Jawa masih menyumbang lebih dari separuh struktur ekonomi nasional, sementara beberapa wilayah lain mencatat laju pertumbuhan lebih tinggi (BPS, 2026a). Perbedaan tersebut perlu dibaca bersama kualitas infrastruktur, biaya logistik, pendidikan, kesehatan, dan struktur pekerjaan. Daerah yang tumbuh cepat karena satu komoditas belum tentu memiliki ketahanan ekonomi tinggi jika diversifikasi rendah.

Strategi wilayah harus berbasis pada ekosistem. Daerah pertanian membutuhkan pengolahan hasil, gudang, cold chain, pembiayaan, dan akses pasar. Daerah pariwisata membutuhkan konektivitas, keterampilan pelayanan, konservasi, dan UMKM lokal. Daerah industri membutuhkan perumahan, air, listrik, sekolah vokasi, transportasi pekerja, serta supplier lokal.

Desentralisasi memberi pemerintah daerah peran besar dalam menentukan kualitas hidup melalui perizinan, tata ruang, layanan publik, infrastruktur lokal, dan pengembangan ekonomi. Keberhasilan daerah sebaiknya tidak hanya dinilai dari realisasi investasi, tetapi dari pekerjaan, upah, penurunan kemiskinan, kualitas lingkungan, dan perbaikan layanan publik.

Implikasi analitis dan manajerial

Implikasi utama bagian ini adalah bahwa evaluasi kebijakan harus bergerak dari indikator output administratif menuju outcome rumah tangga. Setiap program pembangunan perlu menanyakan siapa yang menerima manfaat, apakah manfaat tersebut bertahan, dan apakah terjadi perubahan pada produktivitas, pendapatan riil, akses layanan, serta kemampuan menghadapi risiko. Pendekatan ini menuntut integrasi data ekonomi, sosial, spasial, dan lingkungan. Kebijakan yang tampak berhasil pada rata-rata nasional dapat memerlukan koreksi apabila dampaknya lemah bagi kelompok bawah, perempuan, pemuda, pekerja informal, atau wilayah dengan biaya hidup tinggi. Dengan demikian, manajemen pembangunan perlu menggunakan evaluasi distribusional sebagai bagian rutin dari pengambilan keputusan.

15. Kelas Menengah: Barometer Ketahanan Taraf Hidup

Kelas menengah sering dianggap sebagai hasil sekaligus mesin pertumbuhan. Mereka mengonsumsi barang dan jasa lebih beragam, menabung, membeli rumah, berinvestasi pada pendidikan anak, dan menjadi basis pajak. Namun kelas menengah juga rentan ketika biaya pendidikan, kesehatan, perumahan, dan transportasi naik lebih cepat daripada pendapatan.

World Bank menyoroti bahwa banyak pekerjaan di Indonesia masih berada pada aktivitas bernilai tambah rendah dan belum mampu membayar upah kelas menengah. Antara 2018 dan 2024, World Bank

mencatat penurunan upah riil rata-rata tahunan sebesar 1,1 persen (World Bank, 2025). Ini membantu menjelaskan mengapa ekonomi dapat tumbuh sementara sebagian rumah tangga tetap merasa sulit meningkatkan standar hidup.

Ketahanan kelas menengah memerlukan layanan publik berkualitas. Ketika keluarga harus membeli pendidikan, kesehatan, transportasi, dan keamanan secara privat karena layanan publik tidak memadai, pengeluaran wajib meningkat dan kemampuan menabung turun. Dengan demikian, reformasi layanan publik merupakan kebijakan penguatan kelas menengah.

Perlu pula memperhatikan kelompok aspiring middle class atau kelompok rentan yang berada di antara kemiskinan dan kelas menengah mapan. Kelompok ini sering tidak cukup miskin untuk menerima banyak bantuan, tetapi belum memiliki aset atau perlindungan cukup menghadapi shock. Kebijakan sosial modern perlu lebih adaptif terhadap spektrum kerentanan ini.

Implikasi analitis dan manajerial

Implikasi utama bagian ini adalah bahwa evaluasi kebijakan harus bergerak dari indikator output administratif menuju outcome rumah tangga. Setiap program pembangunan perlu menanyakan siapa yang menerima manfaat, apakah manfaat tersebut bertahan, dan apakah terjadi perubahan pada produktivitas, pendapatan riil, akses layanan, serta kemampuan menghadapi risiko. Pendekatan ini menuntut integrasi data ekonomi, sosial, spasial, dan lingkungan. Kebijakan yang tampak berhasil pada rata-rata nasional dapat memerlukan koreksi apabila dampaknya lemah bagi kelompok bawah, perempuan, pemuda, pekerja informal, atau wilayah dengan biaya hidup tinggi. Dengan demikian, manajemen pembangunan perlu menggunakan evaluasi distribusional sebagai bagian rutin dari pengambilan keputusan.

16. Kepercayaan Konsumen dan Persepsi Kesejahteraan

Taraf hidup memiliki dimensi objektif dan subjektif. Dua rumah tangga dengan pendapatan sama dapat menilai kondisi ekonomi berbeda tergantung keamanan pekerjaan, utang, harapan masa depan, kesehatan, dan pengalaman harga. Karena itu, survei keyakinan konsumen memberi informasi tambahan tentang bagaimana masyarakat merasakan kondisi ekonomi.

Bank Indonesia melaporkan Indeks Keyakinan Konsumen pada Mei 2026 sebesar 120,9, masih berada pada zona optimis. Indeks Ekspektasi Konsumen tercatat 129,7, sedangkan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini 112,2 (Bank Indonesia, 2026). Data ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap masa depan relatif terjaga, tetapi tetap perlu dibaca bersama indikator pendapatan dan pekerjaan.

Kepercayaan memiliki efek ekonomi nyata. Rumah tangga yang khawatir akan kehilangan pekerjaan cenderung menambah tabungan berjaga-jaga dan menunda pembelian besar. Perusahaan yang tidak yakin terhadap permintaan akan menunda investasi dan perekrutan. Karena itu, stabilitas kebijakan, transparansi, dan komunikasi yang kredibel membantu menjaga konsumsi dan investasi.

Namun kebijakan tidak boleh mengejar optimisme semu. Persepsi yang sehat harus dibangun oleh pengalaman nyata: harga terkendali, pekerjaan tersedia, layanan publik berfungsi, dan aturan dipercaya. Kepercayaan yang berakar pada institusi adalah bagian penting dari kualitas hidup karena mengurangi ketidakpastian yang harus ditanggung rumah tangga.

Implikasi analitis dan manajerial

Implikasi utama bagian ini adalah bahwa evaluasi kebijakan harus bergerak dari indikator output administratif menuju outcome rumah tangga. Setiap program pembangunan perlu menanyakan siapa yang menerima manfaat, apakah manfaat tersebut bertahan, dan apakah terjadi perubahan pada produktivitas, pendapatan riil, akses layanan, serta kemampuan menghadapi risiko. Pendekatan ini menuntut integrasi data ekonomi, sosial, spasial, dan lingkungan. Kebijakan yang tampak berhasil pada rata-rata nasional dapat memerlukan koreksi apabila dampaknya lemah bagi kelompok bawah, perempuan, pemuda, pekerja informal, atau wilayah dengan biaya hidup tinggi. Dengan demikian, manajemen pembangunan perlu menggunakan evaluasi distribusional sebagai bagian rutin dari pengambilan keputusan.

17. Bagaimana Menilai Pertumbuhan yang Benar-Benar Inklusif?

Untuk menilai apakah pertumbuhan meningkatkan taraf hidup, diperlukan dashboard indikator. Pertama adalah pertumbuhan PDB dan PDB per kapita. Kedua adalah indikator pasar kerja: tingkat partisipasi, pengangguran, underemployment, upah riil, formalitas, dan keselamatan kerja. Ketiga adalah indikator distribusi: kemiskinan, kerentanan, Gini Ratio, dan pangsa pengeluaran kelompok bawah.

Keempat adalah indikator pembangunan manusia: harapan hidup, pendidikan, pengeluaran riil, status gizi, akses kesehatan, dan kualitas pembelajaran. Kelima adalah indikator biaya hidup: inflasi, harga pangan, sewa, transportasi, dan beban utang. Keenam adalah indikator lingkungan dan kualitas kota: polusi, akses ruang hijau, air bersih, waktu perjalanan, dan risiko bencana.

Ketujuh adalah indikator mobilitas: seberapa mudah anak dari keluarga miskin memperoleh pendidikan berkualitas, seberapa besar pekerja dapat berpindah ke pekerjaan lebih produktif, dan seberapa banyak UMKM dapat naik kelas. Mobilitas sangat penting karena masyarakat akan lebih menerima perbedaan hasil ketika peluang untuk maju dianggap terbuka dan adil.

Dashboard harus disajikan menurut wilayah dan kelompok penduduk. Rata-rata nasional dapat menutupi masalah perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, pekerja informal, atau daerah tertinggal. Manajemen kebijakan yang baik memerlukan data cukup rinci untuk mengenali siapa yang belum memperoleh manfaat pertumbuhan.

Implikasi analitis dan manajerial

Implikasi utama bagian ini adalah bahwa evaluasi kebijakan harus bergerak dari indikator output administratif menuju outcome rumah tangga. Setiap program pembangunan perlu menanyakan siapa yang menerima manfaat, apakah manfaat tersebut bertahan, dan apakah terjadi perubahan pada produktivitas, pendapatan riil, akses layanan, serta kemampuan menghadapi risiko. Pendekatan ini menuntut integrasi data ekonomi, sosial, spasial, dan lingkungan. Kebijakan yang tampak berhasil pada rata-rata nasional dapat memerlukan koreksi apabila dampaknya lemah bagi kelompok bawah, perempuan, pemuda, pekerja informal, atau wilayah dengan biaya hidup tinggi. Dengan demikian, manajemen pembangunan perlu menggunakan evaluasi distribusional sebagai bagian rutin dari pengambilan keputusan.

18. Strategi Kebijakan: Mengubah Pertumbuhan menjadi Taraf Hidup

Strategi pertama adalah memprioritaskan penciptaan pekerjaan produktif. Insentif investasi sebaiknya menilai bukan hanya nilai modal, tetapi juga transfer teknologi, supplier lokal, pelatihan,

kualitas pekerjaan, dan dampak regional. Sektor yang padat modal tetap penting, tetapi harus dibangun linkage agar manfaatnya menyebar ke jasa, UMKM, logistik, konstruksi, dan pendidikan.

Strategi kedua adalah menaikkan produktivitas dan upah riil secara bersama. Program digitalisasi, manajemen, vokasi, riset, infrastruktur, dan akses pembiayaan perlu diarahkan pada peningkatan nilai tambah per pekerja. Sistem pengupahan dan dialog sosial kemudian membantu membagikan sebagian manfaat produktivitas kepada pekerja.

Strategi ketiga adalah memperkuat layanan publik sebagai social wage. Pendidikan, kesehatan, transportasi, air, sanitasi, dan perumahan yang baik mengurangi biaya hidup dan meningkatkan kemampuan efektif rumah tangga. Manfaat ini dapat sangat besar meskipun tidak tercermin sebagai kenaikan gaji.

Strategi keempat adalah membangun perlindungan sosial adaptif. Bantuan sosial harus cepat merespons kehilangan pekerjaan, kenaikan harga, bencana, dan penyakit, tetapi juga terhubung dengan pelatihan, penempatan kerja, dan layanan pengembangan usaha. Tujuannya adalah melindungi konsumsi sekaligus memperkuat mobilitas.

Strategi kelima adalah menjaga kompetisi dan integritas pasar. Monopoli, biaya tersembunyi, kartel, dan informasi asimetris dapat memindahkan manfaat pertumbuhan dari konsumen kepada pelaku yang memiliki kekuatan pasar. Persaingan sehat mendorong inovasi, menekan harga, dan memperbaiki distribusi surplus ekonomi.

Strategi keenam adalah memasukkan lingkungan dan resiliensi ke dalam perencanaan. Infrastruktur tahan bencana, energi bersih, pengelolaan air, restorasi ekosistem, dan adaptasi iklim melindungi taraf hidup dari kerugian yang dapat menghapus hasil pertumbuhan bertahun-tahun.

Implikasi analitis dan manajerial

Implikasi utama bagian ini adalah bahwa evaluasi kebijakan harus bergerak dari indikator output administratif menuju outcome rumah tangga. Setiap program pembangunan perlu menanyakan siapa yang menerima manfaat, apakah manfaat tersebut bertahan, dan apakah terjadi perubahan pada produktivitas, pendapatan riil, akses layanan, serta kemampuan menghadapi risiko. Pendekatan ini menuntut integrasi data ekonomi, sosial, spasial, dan lingkungan. Kebijakan yang tampak berhasil pada rata-rata nasional dapat memerlukan koreksi apabila dampaknya lemah bagi kelompok bawah, perempuan, pemuda, pekerja informal, atau wilayah dengan biaya hidup tinggi. Dengan demikian, manajemen pembangunan perlu menggunakan evaluasi distribusional sebagai bagian rutin dari pengambilan keputusan.

19. Peran Pemerintah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat

Pemerintah berperan menciptakan stabilitas makro, aturan pasar, layanan publik, perlindungan sosial, dan investasi dasar. Namun peningkatan taraf hidup tidak dapat disediakan pemerintah sendirian. Dunia usaha menentukan sebagian besar keputusan investasi, teknologi, perekrutan, upah, dan inovasi. Kualitas tata kelola perusahaan karena itu memiliki implikasi publik yang besar.

Perguruan tinggi dapat menjadi penghubung antara pengetahuan, teknologi, kebijakan, dan kebutuhan tenaga kerja. Universitas dapat melakukan riset regional, membantu UMKM, mendesain program reskilling, mengembangkan inovasi, dan mengevaluasi kebijakan. Di era AI, fungsi ini semakin penting karena perubahan teknologi berlangsung lebih cepat daripada siklus kurikulum tradisional.

Masyarakat sipil dan komunitas lokal juga memiliki peran dalam memastikan pembangunan sesuai kebutuhan. Partisipasi membantu mengidentifikasi dampak yang tidak terlihat dalam analisis agregat, misalnya kehilangan mata pencaharian akibat proyek, perubahan akses lahan, atau masalah lingkungan. Proses partisipatif dapat meningkatkan legitimasi dan kualitas keputusan.

Kolaborasi antarpihak harus berorientasi pada outcome, bukan seremoni. Kemitraan dinilai berhasil jika produktivitas meningkat, pekerjaan membaik, kemiskinan menurun, layanan publik lebih baik, dan lingkungan terlindungi. Dengan ukuran hasil yang jelas, kolaborasi menjadi mekanisme akuntabilitas sekaligus inovasi.

Implikasi analitis dan manajerial

Implikasi utama bagian ini adalah bahwa evaluasi kebijakan harus bergerak dari indikator output administratif menuju outcome rumah tangga. Setiap program pembangunan perlu menanyakan siapa yang menerima manfaat, apakah manfaat tersebut bertahan, dan apakah terjadi perubahan pada produktivitas, pendapatan riil, akses layanan, serta kemampuan menghadapi risiko. Pendekatan ini menuntut integrasi data ekonomi, sosial, spasial, dan lingkungan. Kebijakan yang tampak berhasil pada rata-rata nasional dapat memerlukan koreksi apabila dampaknya lemah bagi kelompok bawah, perempuan, pemuda, pekerja informal, atau wilayah dengan biaya hidup tinggi. Dengan demikian, manajemen pembangunan perlu menggunakan evaluasi distribusional sebagai bagian rutin dari pengambilan keputusan.

20. Kesimpulan: Pertumbuhan yang Bernilai adalah Pertumbuhan yang Dirasakan

Jawaban terhadap pertanyaan artikel ini adalah: ya, pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, tetapi tidak secara otomatis. Pertumbuhan menyediakan sumber daya dan peluang, sementara institusi, distribusi, pasar kerja, layanan publik, dan kualitas lingkungan menentukan bagaimana sumber daya tersebut diterjemahkan menjadi kehidupan nyata. Karena itu, pertumbuhan harus dipandang sebagai sarana, bukan tujuan akhir.

Indonesia menunjukkan sejumlah perkembangan positif. Ekonomi tumbuh 5,61 persen pada triwulan I-2026, kemiskinan menurun, ketimpangan pengeluaran membaik, pengangguran terbuka turun, dan IPM meningkat. Indikator-indikator ini menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi memiliki hubungan nyata dengan perbaikan sosial. Namun tantangan kualitas pekerjaan, upah, produktivitas, informalitas, ketimpangan wilayah, dan biaya hidup tetap membutuhkan perhatian.

Kebijakan yang berorientasi pada taraf hidup harus menghubungkan pertumbuhan dengan lima jalur utama: pekerjaan produktif, pendapatan riil, layanan publik, perlindungan terhadap risiko, dan keberlanjutan lingkungan. Di atas semuanya, diperlukan mobilitas: masyarakat harus mempunyai peluang nyata untuk naik kelas melalui pendidikan, keterampilan, usaha, dan pekerjaan.

Ukuran keberhasilan pembangunan pada akhirnya bukan hanya berapa besar ekonomi Indonesia, melainkan seberapa besar kemampuan warga untuk hidup sehat, berpendidikan, bekerja produktif, memiliki tempat tinggal layak, membangun tabungan, menikmati lingkungan yang aman, dan memandang masa depan dengan percaya diri. Pertumbuhan yang paling bernilai adalah pertumbuhan yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari dan diwariskan sebagai peluang yang lebih baik bagi generasi berikutnya.

21. Sintesis: Tujuh Mekanisme yang Menentukan Apakah Pertumbuhan Menaikkan Taraf Hidup

Mekanisme 1 - Pekerjaan. Pertumbuhan perlu menciptakan pekerjaan dalam jumlah memadai dan dengan kualitas yang meningkat. Pekerjaan adalah jalur utama distribusi pendapatan bagi rumah tangga. Jika pertumbuhan hanya menaikkan laba atau output padat modal tanpa employment linkage, manfaat terhadap kesejahteraan menjadi lebih sempit.

Dalam praktik manajemen kebijakan, mekanisme ini dapat diterjemahkan menjadi indikator dan target yang saling berhubungan. Misalnya, keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari nilai proyek, tetapi juga pekerjaan, supplier lokal, produktivitas, upah, dan dampak lingkungan. Keberhasilan program pendidikan tidak hanya dari jumlah peserta, tetapi dari kualitas belajar, penempatan kerja, dan kenaikan pendapatan. Kerangka seperti ini membantu pemerintah menghindari fragmentasi dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar menjadi peningkatan kualitas kehidupan.

Mekanisme 2 - Upah riil. Pendapatan nominal harus tumbuh lebih cepat daripada biaya hidup. Karena itu, produktivitas, persaingan tenaga kerja, stabilitas harga, dan layanan publik bekerja bersama menentukan daya beli. Upah yang naik tetapi terkikis inflasi tidak menghasilkan kenaikan taraf hidup yang berarti.

Dalam praktik manajemen kebijakan, mekanisme ini dapat diterjemahkan menjadi indikator dan target yang saling berhubungan. Misalnya, keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari nilai proyek, tetapi juga pekerjaan, supplier lokal, produktivitas, upah, dan dampak lingkungan. Keberhasilan program pendidikan tidak hanya dari jumlah peserta, tetapi dari kualitas belajar, penempatan kerja, dan kenaikan pendapatan. Kerangka seperti ini membantu pemerintah menghindari fragmentasi dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar menjadi peningkatan kualitas kehidupan.

Mekanisme 3 - Distribusi. Siapa yang memperoleh tambahan pendapatan menentukan besar dampak sosial pertumbuhan. Pertumbuhan yang lebih inklusif menghasilkan penurunan kemiskinan, penguatan kelas menengah, dan peningkatan konsumsi produktif seperti pendidikan serta kesehatan.

Dalam praktik manajemen kebijakan, mekanisme ini dapat diterjemahkan menjadi indikator dan target yang saling berhubungan. Misalnya, keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari nilai proyek, tetapi juga pekerjaan, supplier lokal, produktivitas, upah, dan dampak lingkungan. Keberhasilan program pendidikan tidak hanya dari jumlah peserta, tetapi dari kualitas belajar, penempatan kerja, dan kenaikan pendapatan. Kerangka seperti ini membantu pemerintah menghindari fragmentasi dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar menjadi peningkatan kualitas kehidupan.

Mekanisme 4 - Layanan publik. Taraf hidup bergantung pada apa yang dapat diakses rumah tangga, bukan hanya uang yang diterima. Pendidikan, kesehatan, transportasi, air, sanitasi, dan perumahan mengubah pendapatan nominal menjadi kapabilitas yang lebih besar.

Dalam praktik manajemen kebijakan, mekanisme ini dapat diterjemahkan menjadi indikator dan target yang saling berhubungan. Misalnya, keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari nilai proyek, tetapi juga pekerjaan, supplier lokal, produktivitas, upah, dan dampak lingkungan. Keberhasilan program pendidikan tidak hanya dari jumlah peserta, tetapi dari kualitas belajar, penempatan kerja, dan kenaikan pendapatan. Kerangka seperti ini membantu pemerintah menghindari fragmentasi dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar menjadi peningkatan kualitas kehidupan.

Mekanisme 5 - Mobilitas. Masyarakat memerlukan jalur untuk bergerak dari pekerjaan berproduktivitas rendah ke pekerjaan yang lebih baik, dari usaha mikro ke usaha yang lebih besar, dan dari kerentanan menuju kelas menengah. Mobilitas membuat pertumbuhan lebih legitim dan dinamis.

Dalam praktik manajemen kebijakan, mekanisme ini dapat diterjemahkan menjadi indikator dan target yang saling berhubungan. Misalnya, keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari nilai proyek, tetapi juga pekerjaan, supplier lokal, produktivitas, upah, dan dampak lingkungan. Keberhasilan program pendidikan tidak hanya dari jumlah peserta, tetapi dari kualitas belajar, penempatan kerja, dan kenaikan pendapatan. Kerangka seperti ini membantu pemerintah menghindari fragmentasi dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar menjadi peningkatan kualitas kehidupan.

Mekanisme 6 - Resiliensi. Kenaikan taraf hidup dapat hilang akibat sakit, PHK, bencana, atau shock harga. Perlindungan sosial, asuransi, tabungan, infrastruktur tahan bencana, dan stabilitas makro menjaga agar kemajuan tidak mudah berbalik.

Dalam praktik manajemen kebijakan, mekanisme ini dapat diterjemahkan menjadi indikator dan target yang saling berhubungan. Misalnya, keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari nilai proyek, tetapi juga pekerjaan, supplier lokal, produktivitas, upah, dan dampak lingkungan. Keberhasilan program pendidikan tidak hanya dari jumlah peserta, tetapi dari kualitas belajar, penempatan kerja, dan kenaikan pendapatan. Kerangka seperti ini membantu pemerintah menghindari fragmentasi dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar menjadi peningkatan kualitas kehidupan.

Mekanisme 7 - Keberlanjutan. Pertumbuhan yang menghabiskan modal alam atau meningkatkan risiko iklim dapat menurunkan kesejahteraan jangka panjang. Pembangunan perlu menjaga agar peningkatan hari ini tidak mengurangi kesempatan generasi mendatang.

Dalam praktik manajemen kebijakan, mekanisme ini dapat diterjemahkan menjadi indikator dan target yang saling berhubungan. Misalnya, keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari nilai proyek, tetapi juga pekerjaan, supplier lokal, produktivitas, upah, dan dampak lingkungan. Keberhasilan program pendidikan tidak hanya dari jumlah peserta, tetapi dari kualitas belajar, penempatan kerja, dan kenaikan pendapatan. Kerangka seperti ini membantu pemerintah menghindari fragmentasi dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar menjadi peningkatan kualitas kehidupan.

22. Agenda Kebijakan Indonesia 2026-2030

1. Bangun dashboard nasional taraf hidup yang menggabungkan pertumbuhan, pekerjaan, upah riil, kemiskinan, ketimpangan, IPM, biaya perumahan, transportasi, dan indikator lingkungan.

Pelaksanaan agenda ini memerlukan pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil. Setiap prioritas perlu memiliki indikator outcome, sumber data, target tahunan, serta mekanisme evaluasi. Pendekatan tersebut akan memperkuat disiplin implementasi dan membuat perdebatan tentang pertumbuhan lebih dekat dengan pengalaman nyata masyarakat.

2. Gunakan employment and distributional impact assessment untuk investasi besar, reformasi subsidi, perpajakan, tarif, dan kebijakan teknologi.

Pelaksanaan agenda ini memerlukan pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil. Setiap prioritas perlu memiliki

indikator outcome, sumber data, target tahunan, serta mekanisme evaluasi. Pendekatan tersebut akan memperkuat disiplin implementasi dan membuat perdebatan tentang pertumbuhan lebih dekat dengan pengalaman nyata masyarakat.

3. Perkuat produktivitas UMKM melalui pasar, manajemen, digitalisasi, supplier development, pembiayaan berbasis arus kas, dan standar mutu.

Pelaksanaan agenda ini memerlukan pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil. Setiap prioritas perlu memiliki indikator outcome, sumber data, target tahunan, serta mekanisme evaluasi. Pendekatan tersebut akan memperkuat disiplin implementasi dan membuat perdebatan tentang pertumbuhan lebih dekat dengan pengalaman nyata masyarakat.

4. Hubungkan pendidikan dan pelatihan dengan occupational pathway yang jelas, apprenticeship, reskilling, serta kebutuhan industri dan jasa modern.

Pelaksanaan agenda ini memerlukan pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil. Setiap prioritas perlu memiliki indikator outcome, sumber data, target tahunan, serta mekanisme evaluasi. Pendekatan tersebut akan memperkuat disiplin implementasi dan membuat perdebatan tentang pertumbuhan lebih dekat dengan pengalaman nyata masyarakat.

5. Jadikan layanan publik berkualitas sebagai strategi peningkatan daya beli: kesehatan, pendidikan, transportasi, air, sanitasi, dan perumahan.

Pelaksanaan agenda ini memerlukan pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil. Setiap prioritas perlu memiliki indikator outcome, sumber data, target tahunan, serta mekanisme evaluasi. Pendekatan tersebut akan memperkuat disiplin implementasi dan membuat perdebatan tentang pertumbuhan lebih dekat dengan pengalaman nyata masyarakat.

6. Perkuat perlindungan sosial adaptif untuk kelompok miskin, rentan, dan kelas menengah bawah yang terkena shock.

Pelaksanaan agenda ini memerlukan pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil. Setiap prioritas perlu memiliki indikator outcome, sumber data, target tahunan, serta mekanisme evaluasi. Pendekatan tersebut akan memperkuat disiplin implementasi dan membuat perdebatan tentang pertumbuhan lebih dekat dengan pengalaman nyata masyarakat.

7. Percepat pembangunan wilayah melalui strategi ekonomi lokal yang berbasis keunggulan, konektivitas, dan pengembangan supplier lokal.

Pelaksanaan agenda ini memerlukan pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil. Setiap prioritas perlu memiliki indikator outcome, sumber data, target tahunan, serta mekanisme evaluasi. Pendekatan tersebut akan memperkuat disiplin implementasi dan membuat perdebatan tentang pertumbuhan lebih dekat dengan pengalaman nyata masyarakat.

8. Pastikan transformasi AI, digital, dan hijau disertai human transition plan agar produktivitas teknologi menjadi peningkatan kesempatan manusia.

Pelaksanaan agenda ini memerlukan pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil. Setiap prioritas perlu memiliki indikator outcome, sumber data, target tahunan, serta mekanisme evaluasi. Pendekatan tersebut akan memperkuat disiplin implementasi dan membuat perdebatan tentang pertumbuhan lebih dekat dengan pengalaman nyata masyarakat.

9. Jaga persaingan usaha, perlindungan konsumen, transparansi harga, dan integritas pasar agar manfaat pertumbuhan tidak terkikis oleh kekuatan pasar yang berlebihan.

Pelaksanaan agenda ini memerlukan pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil. Setiap prioritas perlu memiliki indikator outcome, sumber data, target tahunan, serta mekanisme evaluasi. Pendekatan tersebut akan memperkuat disiplin implementasi dan membuat perdebatan tentang pertumbuhan lebih dekat dengan pengalaman nyata masyarakat.

10. Integrasikan modal alam dan resiliensi iklim ke dalam pengukuran keberhasilan pembangunan.

Pelaksanaan agenda ini memerlukan pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil. Setiap prioritas perlu memiliki indikator outcome, sumber data, target tahunan, serta mekanisme evaluasi. Pendekatan tersebut akan memperkuat disiplin implementasi dan membuat perdebatan tentang pertumbuhan lebih dekat dengan pengalaman nyata masyarakat.

23. Ilustrasi Kasus: Mengapa Pertumbuhan Dapat Dirasakan Berbeda oleh Rumah Tangga

Kasus pertama adalah keluarga pekerja formal di kota besar. Pendapatan kepala keluarga naik karena perusahaan berkembang, sehingga secara nominal keluarga tersebut menikmati buah pertumbuhan. Namun pada saat yang sama sewa rumah, biaya perjalanan, pendidikan anak, dan harga pangan meningkat. Jika kenaikan pendapatan setelah inflasi hanya sedikit, keluarga mungkin tidak menambah tabungan dan tetap merasa rapuh. Kasus ini menunjukkan bahwa pertumbuhan baru meningkatkan taraf hidup jika upah riil dan kualitas layanan perkotaan bergerak bersama. Pemerintah daerah yang memperbaiki transportasi publik, sekolah, kesehatan, dan pasokan perumahan sebenarnya sedang memperbesar pendapatan efektif keluarga tanpa harus menaikkan gaji secara langsung.

Kasus kedua adalah petani kecil di wilayah yang mengalami pertumbuhan industri. PDB daerah meningkat cepat karena investasi pengolahan mineral atau manufaktur, tetapi petani dapat memperoleh manfaat yang kecil bila rantai pasok industri tidak menggunakan produk lokal, harga tanah meningkat, dan keterampilan yang diminta perusahaan tidak dimiliki penduduk sekitar. Sebaliknya, jika investasi disertai sekolah vokasi, supplier development, jalan produksi, pembiayaan usaha, dan kebijakan pengadaan lokal, pertumbuhan industri dapat menciptakan lapangan kerja tambahan serta pasar bagi usaha setempat. Perbedaan antara dua skenario tersebut terletak pada linkage, bukan pada angka pertumbuhan proyek itu sendiri.

Kasus ketiga adalah pekerja platform digital. Pertumbuhan ekonomi digital membuka kesempatan memperoleh pendapatan dengan fleksibilitas tinggi. Namun penghasilan dapat berubah dari hari ke hari, biaya kendaraan ditanggung sendiri, dan perlindungan sosial mungkin terbatas. Ketika permintaan meningkat, pendapatan bisa naik, tetapi tanpa kemampuan menabung dan perlindungan terhadap sakit

atau kecelakaan, taraf hidup tetap rentan. Kebijakan yang mendukung portabilitas jaminan sosial, transparansi algoritma, literasi keuangan, dan peningkatan keterampilan dapat mengubah pekerjaan platform dari sekadar mekanisme bertahan hidup menjadi jalur mobilitas.

Kasus keempat adalah pemilik UMKM makanan. Ketika konsumsi masyarakat tumbuh, omzet meningkat dan pemilik mempertimbangkan merekrut pekerja. Namun jika harga bahan baku, sewa, dan biaya platform meningkat lebih cepat, margin tetap tipis. Kredit tambahan saja belum tentu membantu. Usaha lebih membutuhkan produktivitas: pembelian bahan secara kolektif, pengendalian persediaan, pemasaran yang efektif, pencatatan digital, dan standar produk. Ketika produktivitas meningkat, laba dan kapasitas membayar upah juga naik. Inilah contoh mikro bagaimana pertumbuhan nasional perlu diterjemahkan melalui perbaikan kemampuan perusahaan.

Kasus kelima adalah rumah tangga kelas menengah dengan dua pencari nafkah. Secara statistik mereka jauh di atas garis kemiskinan, tetapi memiliki cicilan rumah, biaya pendidikan, orang tua yang memerlukan perawatan kesehatan, dan kewajiban transportasi. Kehilangan satu pekerjaan selama beberapa bulan dapat segera menguras tabungan. Kelompok seperti ini menunjukkan pentingnya melihat kerentanan di luar kemiskinan resmi. Asuransi, layanan kesehatan publik, pasar kerja yang dinamis, childcare, dan sistem reskilling dapat menentukan apakah rumah tangga mempertahankan posisi kelas menengah ketika ekonomi mengalami guncangan.

Kasus keenam adalah masyarakat di wilayah kaya sumber daya alam. Pertumbuhan PDB dapat tinggi ketika harga komoditas meningkat. Pemerintah daerah memperoleh penerimaan dan perusahaan mencatat ekspansi. Namun taraf hidup masyarakat akan sangat bergantung pada apakah pendapatan tersebut digunakan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur produktif, diversifikasi ekonomi, dan tabungan antargenerasi. Jika tidak, daerah dapat menghadapi volatilitas, kerusakan lingkungan, dan ketergantungan pada satu komoditas. Kasus ini menegaskan perbedaan antara income dan wealth: pendapatan hari ini harus diubah menjadi aset manusia, fisik, institusional, dan alam yang menopang kesejahteraan masa depan.

Enam ilustrasi tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan adalah sebuah peluang, bukan jaminan. Pada setiap kasus, mekanisme transmisinya berbeda: upah riil, linkage industri, perlindungan sosial, produktivitas UMKM, ketahanan kelas menengah, atau pengelolaan kekayaan alam. Inilah alasan mengapa kebijakan pembangunan memerlukan pendekatan sistem. Satu indikator tidak dapat menjelaskan seluruh pengalaman ekonomi masyarakat, dan satu instrumen tidak cukup untuk memastikan manfaat pertumbuhan tersebar secara luas.

Dari perspektif manajemen strategis, kasus-kasus tersebut juga menunjukkan perlunya segmentasi kebijakan. Rumah tangga miskin memerlukan perlindungan konsumsi dan akses layanan dasar; pekerja muda memerlukan jalur masuk kerja dan keterampilan; kelas menengah memerlukan layanan publik serta perlindungan risiko; UMKM memerlukan produktivitas dan pasar; daerah komoditas memerlukan diversifikasi. Kebijakan universal tetap penting untuk stabilitas dan layanan dasar, tetapi intervensi khusus harus menyesuaikan sumber kerentanan dan potensi mobilitas masing-masing kelompok.

Glossarium

Pertumbuhan ekonomi: Peningkatan output barang dan jasa riil dalam suatu perekonomian dari waktu ke waktu.

Produk Domestik Bruto (PDB): Nilai tambah barang dan jasa akhir yang diproduksi di suatu wilayah dalam periode tertentu.

PDB per kapita: PDB dibagi jumlah penduduk; indikator rata-rata kapasitas ekonomi per orang.

Taraf hidup: Tingkat kemampuan seseorang atau rumah tangga memenuhi kebutuhan dan menjalani kehidupan yang layak.

Kapabilitas: Kemampuan nyata seseorang untuk melakukan dan menjalani hal-hal yang bernilai dalam kehidupannya.

Daya beli: Kemampuan pendapatan untuk memperoleh barang dan jasa pada tingkat harga tertentu.

Upah riil: Upah nominal yang telah disesuaikan dengan perubahan tingkat harga.

Inflasi: Kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan.

Kemiskinan: Kondisi ketika sumber daya tidak cukup memenuhi kebutuhan minimum menurut standar yang digunakan.

Kerentanan: Risiko rumah tangga jatuh ke kondisi ekonomi yang lebih buruk ketika terkena guncangan.

Gini Ratio: Indeks ketimpangan distribusi pengeluaran atau pendapatan, dari 0 (merata sempurna) hingga 1 (timpang sempurna).

IPM: Indeks Pembangunan Manusia yang menggabungkan kesehatan, pendidikan, dan standar hidup.

Produktivitas: Nilai output yang dihasilkan per unit input, misalnya per pekerja atau per jam kerja.

Pekerjaan produktif: Pekerjaan yang menghasilkan nilai tambah memadai, pendapatan layak, dan peluang peningkatan kemampuan.

Underemployment: Kondisi pekerja yang bekerja kurang dari jam yang diinginkan atau berada pada pekerjaan di bawah kapasitasnya.

Social wage: Manfaat layanan publik yang secara efektif mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.

Mobilitas sosial: Kemampuan individu atau rumah tangga berpindah ke tingkat sosial-ekonomi yang lebih tinggi.

Reskilling: Pembelajaran keterampilan baru agar seseorang dapat berpindah ke pekerjaan atau fungsi baru.

Upskilling: Peningkatan keterampilan untuk memperbaiki kinerja atau jenjang dalam bidang pekerjaan yang sama.

Green growth: Pertumbuhan yang berupaya meningkatkan kemakmuran dengan menjaga modal alam dan mengurangi tekanan lingkungan.

Just transition: Transisi ekonomi dan teknologi yang memperhatikan perlindungan pekerja dan komunitas yang terdampak.

Modal alam: Stok sumber daya alam dan ekosistem yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

Kelas menengah: Kelompok rumah tangga dengan kapasitas konsumsi dan ketahanan ekonomi di atas kelompok miskin dan rentan, meskipun definisi operasional bervariasi.

Ketimpangan kesempatan: Perbedaan peluang hidup yang dipengaruhi kondisi awal seperti keluarga, wilayah, gender, atau akses pendidikan.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2026a, 5 Mei). Ekonomi Indonesia Triwulan I-2026 tumbuh 5,61 persen (y-on-y). BPS-Statistics Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2026b). Indeks Pembangunan Manusia 2025. BPS-Statistics Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2026c, 5 Mei). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,68 persen; rata-rata upah buruh sebesar 3,29 juta rupiah. BPS-Statistics Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2026d, 1 Juli). Inflasi year-on-year (y-on-y) pada Juni 2026 sebesar 3,34 persen. BPS-Statistics Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2026e, 5 Februari). Persentase penduduk miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen. BPS-Statistics Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2026f, 5 Februari). Gini ratio September 2025 tercatat sebesar 0,363. BPS-Statistics Indonesia.
- Bank Indonesia. (2026, 10 Juni). Survei Konsumen Mei 2026: Keyakinan konsumen tetap kuat. Bank Indonesia.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fitoussi, J.-P. (2009). Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress.
- World Bank. (2025, December 16). Indonesia's economy maintains resilience amid global uncertainty. World Bank.
- World Bank. (2026a). *Indonesia Economic Prospects, June 2026: Managing risks, unlocking productivity*. World Bank.
- World Bank. (2026b). *Indonesia Growth and Jobs Report: Running faster, for longer—Structural transformation, productivity, and good jobs*. World Bank.
- Autor, D. H. (2015). Why are there still so many jobs? The history and future of workplace automation. *Journal of Economic Perspectives*, 29(3), 3–30. <https://doi.org/10.1257/jep.29.3.3>
- Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2007). The economic lives of the poor. *Journal of Economic Perspectives*, 21(1), 141–168. <https://doi.org/10.1257/jep.21.1.141>
- Chetty, R., Hendren, N., Kline, P., & Saez, E. (2014). Where is the land of opportunity? The geography of intergenerational mobility in the United States. *Quarterly Journal of Economics*, 129(4), 1553–1623. <https://doi.org/10.1093/qje/qju022>
- Deaton, A. (2013). *The great escape: Health, wealth, and the origins of inequality*. Princeton University Press.
- Haltiwanger, J., Jarmin, R. S., & Miranda, J. (2013). Who creates jobs? Small versus large versus young. *Review of Economics and Statistics*, 95(2), 347–361. https://doi.org/10.1162/REST_a_00288

- McMillan, M., Rodrik, D., & Verduzco-Gallo, Í. (2014). Globalization, structural change, and productivity growth, with an update on Africa. *World Development*, 63, 11–32.
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.10.012>
- Rodrik, D. (2016). Premature deindustrialization. *Journal of Economic Growth*, 21, 1–33.
<https://doi.org/10.1007/s10887-015-9122-3>
- OECD. (2011). *How's life? Measuring well-being*. OECD Publishing.
<https://doi.org/10.1787/9789264121164-en>
- OECD. (2019). *Under pressure: The squeezed middle class*. OECD Publishing.
<https://doi.org/10.1787/689afed1-en>

Catatan Penulis

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD. Institut Bisnis dan Multimedia (IBM ASMI). Profil penulis:
www.rudyc.com/cv.pdf.